



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan beberapa jabatan fungsional berdasarkan peraturan menteri terkait, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Daftar Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 133) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 284

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU
 RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN
 JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL/ INSTANSI	NO. KEPUTUSAN/ TANGGAL	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1	Perawat	94/KEP/M.PAN/11/2001 07/11/2001	Kementerian Kesehatan
2	Dokter	139/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2003	Kementerian Kesehatan
3	Dokter Gigi	141/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2000	Kementerian Kesehatan
4	Pengawas Farmasi dan Makanan	48/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Kementerian Kesehatan
5	Apoteker	PER/07/M.PAN/ 4/2008 4/ 15/ 2008	Kementerian Kesehatan
6	Asisten Apoteker	PER/08/M.PAN/4/2008 4/ 15/ 2008	Kementerian Kesehatan
7	Pranata Laboratorium Kesehatan	PER/08/M.PAN/3/2006 3/28/2006	Kementerian Kesehatan
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	58/KEP/M.PAN/8/2000 8/14/2000	Kementerian Kesehatan
9	Epidemiolog Kesehatan	17/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Kementerian Kesehatan
10	Entomolog Kesehatan	18/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Kementerian Kesehatan
11	Sanitarian	19/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000 Jo.PER/10/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
12	Perawat Gigi	22/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001 Jo.PER/14/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
13	Nutrisionis	23/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001	Kementerian Kesehatan
14	Bidan	01/PER/M.PAN/1/2008 1/28/2008	Kementerian Kesehatan
15	Fisioterapis	KEP/04/M.PAN/1/2004 1/19/2004 Jo.PER/12/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
16	Terapis Wicara	PER/48/M.PAN/4/2005 4/21/2005	Kementerian Kesehatan
17	Teknisi Gigi	PER/06/M.PAN/4/2007 4/30/2007	Kementerian Kesehatan
18	Psikolog Klinis	PER/11/M.PAN/5/2008 5/26/2008	Kementerian Kesehatan
19	Perekam Medis	PER/14/M.PAN/3/2006 jo No.135/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Kesehatan
20	Radiografer	PER/15/M.PAN/3/2006 jo No. 133/KEP/M.PAN/12/2002	Kementerian Kesehatan
21	Terapis Transfusi Darah	PER/05/M.PAN/4/2007	Kementerian Kesehatan
22	Pembimbing Kesehatan Kerja	Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2013	Kementerian Kesehatan
23	Guru	Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
24	Pengawas Sekolah	Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25	Pamong Belajar	Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
26	Penilik	Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27	Pengembang Teknologi Pembelajaran	PER/02/M.PAN/3/2009 3/10/2009	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
28	Pranata Laboratorium Pendidikan	Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
29	Penyuluh Kehutanan	130/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 Jo.PER/33/M.PAN/10/2006 10/12/2006	Kementerian Kehutanan
30	Polisi Kehutanan	Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2011	Kementerian Kehutanan
31	Pengendali Ekosistem Hutan	Permenpan dan RB Nomor 50 Tahun 2012	Kementerian Kehutanan
32	Penggerak Swadaya Masyarakat	KEP/58/M.PAN/6/2004 6/14/2004	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	2	3	4
33	Pengantar Kerja	06/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 2/7/2000	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Perantara Hubungan Industrial	40/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	Mediator Hubungan Industrial	PER/06/M.PAN/4/2009 4/7/2009	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36	Pengawas Ketenagakerjaan	Permenpan dan RB Nomor 19 Tahun 2010	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
37	Pekerja Sosial	03/M.PAN/1/2004 1/16/2004	Kementerian Sosial
38	Penyuluh Sosial	PER/06/M.PAN/4/2008 4/9/2008	Kementerian Sosial
39	Penguji Mutu Barang	131/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 KEP/05/M.PAN/1/2005 1/13/2005	Kementerian Perdagangan
40	Penera	128/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 KEP/03/M.PAN/1/2005 38365	Kementerian Perdagangan
41	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	129/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 Jo.KEP/04/M.PAN/1/2005 1/13/2005	Kementerian Perindustrian
42	Penyuluh Pertanian	PER/02/M.PAN/2/2008 2/18/2008	Kementerian Pertanian
43	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	PER/10/M.PAN/05/2008 5/23/2008	Kementerian Pertanian
44	Pengawas Benih Tanaman	Permenpan dan RB Nomor 09 Tahun 2010	Kementerian Pertanian
45	Medik Veteriner	Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2012	Kementerian Pertanian
46	Paramedik Veteriner	Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2012	Kementerian Pertanian
47	Pengawas Bibit Ternak	Permenpan dan RB Nomor 02 Tahun 2011	Kementerian Pertanian
48	Pengawas Mutu Pakan	KEP/31/M.PAN/3/2004 3/18/2004	Kementerian Pertanian
49	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	PER/17/M.PAN/4/2006 4/11/2006	Kementerian Pertanian
50	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Permenpan dan RB Nomor 06 Tahun 2012 jo. Nomor 23 Tahun 2013	Kementerian Pertanian
51	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Permenpan dan RB Nomor 22 Tahun 2010	Kementerian Kelautan dan Perikanan
52	Pengawas Benih Ikan	37/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/52/M.PAN/4/2005 4/27/2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan
53	Pengawas Perikanan	Permenpan dan RB Nomor 01 Tahun 2011	Kementerian Kelautan dan Perikanan
54	Penyuluh Perikanan	PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2013	Kementerian Kelautan dan Perikanan
56	Pengawas Keselamatan Pelayaran	KEP/195/M.PAN/12/2004 12/10/2004	Kementerian Perhubungan
57	Penguji Kendaraan Bermotor	150/KEP/M.PAN/11/2003 11/21/2003	Kementerian Perhubungan
58	Inspektur Tambang	22/KEP/M.PAN/4/2002 4/19/2002	Kementerian Energi dan SDM
59	Inspektur Ketenagalistrikan	21/KEP/M.PAN/4/2002	Kementerian Energi dan SDM
60	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	30/KEP/M.PAN/3/2003 03/7/2003	Kementerian Keuangan
61	Penyuluh Pajak	PER/04/M.PAN/2/2006 2/28/2006	Kementerian Keuangan
62	Pamong Budaya	PER/09/M.PAN/5/2008 5/13/2008	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
63	Kataloger	PER/07/KEP/M.PAN/5/2007 5/30/2007	Kementerian Pertahanan
64	Penata Ruang	PER/10/M.PAN/6/2007 6/18/2007	Kementerian Pekerjaan Umum
65	Teknik Pengairan	63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
66	Teknik Jalan dan Jembatan	64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
67	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
68	Teknik Penyehatan Lingkungan	66/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
69	Perancang Peraturan Perundang-undangan	41/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Kementerian Hukum dan HAM

1	2	3	4
70	Pranata Komputer	66/KEP/M.PAN/7/2003 7/17/2003	Badan Pusat Statistik
71	Statistisi	37/KEP/M.PAN/4/2003 4/7/2003	Badan Pusat Statistik
72	Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Kementerian Lingkungan Hidup
73	Pengawas Lingkungan Hidup	PERMENPAN NO.39 TAHUN 2011	Kementerian Lingkungan Hidup
74	Penerjemah	PER/24/M.PAN/5/2006 5/19/2006	Sekretariat Negara
75	Analisis Kepegawaian	PER/36/M.PAN/11/2006 11/15/2006	Badan Kepegawaian Negara
76	Auditor Kepegawaian	Permenpan dan RB Nomor 40 Tahun 2012	Badan Kepegawaian Negara
77	Auditor	19/1996 5/2/1996 Jo.PER/220/M.PAN/7/2008	BPK dan BPKP
78	Arsiparis	PER/3/M.PAN/3/2009 3/10/2009	Arsip Nasional Republik Indonesia
79	Pustakawan	132/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002	Perpustakaan Nasional
80	Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 9/2/2004	BKKBN
81	Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001 3/19/2001	BAPPENAS
82	Surveyor Pemetaan	134/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
83	Operator Transmisi Sandi	133/KEP/M.PAN/11/2003 11/3/2003	Lembaga Sandi Negara
84	Sandiman	134/KEP/M.PAN/11/2003 11/3/2003	Lembaga Sandi Negara
85	Pranata Hubungan Masyarakat	PER/109/M.PAN/11/2005 11/1/2005	Lembaga Informasi Nasional
86	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	PERMENPAN NO.15/TAHUN 2009 Peraturan Bersama MENDAGRI dari Kepala BKN NO.22 TAHUN 2010 dan NOMOR 03 TAHUN 2010	Kementerian Dalam Negeri
87	Analisis Kebijakan	Permenpan dan RB Nomor 5 Tahun 2012	Lembaga Administrasi Negara
88	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Permenpan dan RB Nomor 77 Tahun 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 204

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN